

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah disharmonisasi hubungan eksekutif dan legislatif, minimnya latar belakang pendidikan, indikator kinerja, komitmen dan penyusun APBD mempengaruhi keterlambatan penyusunan APBD serta keterlambatan penyusunan APBD apakah akan berpengaruh terhadap kinerja penyusun APBD. Penelitian ini menjadikan penelitian sebelumnya sebagai literatur dan referensi. Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya antara lain adanya perbedaan objek penelitian, responden, tempat pengambilan sampel, penambahan variabel penelitian, teknik analisis.

Sumber data penelitian ini meliputi data primer. Populasi penelitian ini adalah Badan Anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Grobogan dengan metode pengambilan sampelnya berupa *convenience sampling* (pemilihan sampel berdasar kemudahan) atau memilih sampel dari elemen populasi (orang atau kejadian). Alat analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah program *Partial Least Square (PLS)*.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa disharmonisasi hubungan eksekutif dan legislatif, minimnya latar belakang pendidikan, indikator kinerja, komitmen dan penyusun APBD berpengaruh positif signifikan terhadap keterlambatan penyusunan APBD selanjutnya keterlambatan penyusunan APBD berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja penyusun APBD.

Kata kunci : disharmonisasi hubungan eksekutif dan legislatif, minimnya latar belakang pendidikan, indikator kinerja, komitmen dan penyusun APBD, keterlambatan penyusunan APBD, kinerja penyusun APBD